

MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN : TINJAUAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI

Moch. Prihatna Sobari¹, Rilus A. Kinseng¹, Fatriyandi N Priyatna²

Abstract

Indonesia entitles of very abundant sea and coastal resources. The resources need to be managed well in order to prevent any destruction that can lead to decrease human quality life. This research aims at developing a model of fisheries resources management in Karang Jaladri village of Ciamis Regency. The model is based on the characteristics of fishermen socio-economics. Socio-anthropology approach is used to explain the findings. The research outcomes is that local knowledge can facilitate the resources management. Co-management can be used as an alternative approach in implementing sea and coastal resources management.

Key words : fishermen, local knowledge, common property, co management

Pendahuluan

Terdapat dua pendapat tentang konsepsi laut yang sangat mendasar, terutama tentang permasalahan kepemilikannya (*claim property*). Pendapat pertama menyatakan bahwa laut adalah *common property* (milik bersama), sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu bangsa (*state property*). Atas dasar pemikiran laut adalah milik bersama (*common property*) menyebabkan suatu permasalahan yang sering dikenal sebagai suatu *tragedy of the common*, yaitu terjadinya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip *open access*, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi sumberdaya (Hardin diacu dalam Bromley 1991).

Regim pengelolaan sumberdaya yang terjadi selama ini kurang atau tidak melibatkan sama sekali masyarakat setempat (*local users*). Regim sentralistik mengakibatkan rendahnya pengawasan, hal ini karena terlalu sedikitnya aparat dan sangat luasnya daerah yang harus diawasi. Daerah yang mempunyai hak ulayat (kearifan lokal) telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengelolaan sumberdaya laut yang *sustainable* dan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anggota masyarakatnya. Sayangnya tidak semua daerah di Indonesia mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang termanifestasi dalam sebuah hak ulayat (hak adat) dalam pengelolaan sumberdayanya, lalu bagaimana dengan daerah yang tidak mempunyai hak ulayat laut dalam perencanaan pengelolaan sumberdayanya? Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi masyarakat daerah di dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

Metodologi

Makalah ini didasarkan atas hasil penelitian dengan menggunakan metode *field research*, yaitu metode penelitian sosial yang menggunakan pengamatan langsung terhadap status subjek penelitian pada kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah mendeskripsikan secara detail tentang latar belakang, sifat serta karakter yang khas dari subjek penelitian. Lokasi tempat penelitian berlangsung adalah di daerah Desa Karangjaladri, Parigi, Ciamis,

¹ Staf Pengajar Departemen Sosial Ekonomi Perikanan-Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

² Alumni Departemen Sosial Ekonomi Perikanan-Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

Jawa Barat. Dalam penelitian ini, data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan teknik tabulasi dan deskriptif kualitatif. Data yang didapat juga akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan karakteristik sosial-ekonomi dan pengelolaan sumberdaya.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sumberdaya dan Dilema *Common Property* Kondisi Sumberdaya

Desa Karangjaladri merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Parigi dan merupakan salah satu desa pantai dengan batas wilayah sebagai berikut :

sebelah Utara	: Desa Parigi, Desa Karangbenda, Desa Ciliang
sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
sebelah Barat	: Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang
sebelah Timur	: Desa Ciliang

Luas Desa Karangjaladri sebesar 354,950 Ha dengan keadaan umum wilayahnya terdiri atas dataran rendah dan pantai, dengan tingkat ketinggian rata-rata adalah 1,5 m dari permukaan laut. Desa Karangjaladri dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Bojongselawe, Dusun Bunlayu dan Dusun Astamaya.

Kegiatan produksi di Perairan Parigi tergantung kepada cuaca dan musim. Secara umum kegiatan penangkapan ikan di Perairan Parigi terbagi dalam dua musim yaitu pada Musim Barat dan Musim Timur. Musim puncak kegiatan penangkapan ikan terjadi pada Musim Timur yaitu ketika angin bertiup dari arah Tenggara yang terjadi pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember, pada bulan-bulan ini para nelayan dapat turun ke laut karena angin dan gelombang laut tidak berbahaya. Musim Barat merupakan musim paceklik bagi nelayan, karena pada musim ini gelombang laut besar, sehingga menyebabkan nelayan banyak yang tidak melaut, walaupun tetap melaut maka konsekuensinya sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan. Musim Barat ini biasa terjadi pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli.

Dilema *Common Property*

Sebagai suatu sumberdaya yang bersifat *common property* dan berada pada suatu tempat yang tidak mudah untuk dipisahkan atau dibagi-bagikan, pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan seorang individu akan berpengaruh pada individu yang lain. Persoalan eksternalitas tetap akan muncul pada saat sumberdaya tersebut dimanfaatkan, walaupun sumberdaya tersebut terdistribusikan merata menurut waktu dan lokasi. Bagi kondisi sumberdaya perikanan, eksternalitas merupakan suatu dilema yang menjadikannya sebuah ciri khas sendiri dan membedakannya dari sumberdaya lainnya. Eksternalitas muncul ketika nelayan mengambil ikan dari laut tanpa memperhitungkan akibat pengambilan ikan tersebut bagi nelayan lain, dan dilema muncul karena keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak akan menyebabkan kerugian bagi nelayan lain karena kurangnya stok ikan.

Dilema lainnya adalah adanya eksternalitas teknologi. Kondisi ini terjadi ketika nelayan saling melakukan intervensi di lokasi penangkapan ikan yang pada akhirnya sering mengakibatkan munculnya konflik antar nelayan. Eksternalitas teknologi terjadi karena nelayan cenderung melakukan penangkapan ikan pada lokasi yang sama sehingga terjadi pertemuan antara alat tangkap yang digunakan dengan menjurus ke arah kerusakan atau perusakan (Kusnadi 2002). Lebih lanjut Kusnadi (2002) menyebutkan juga bahwa penentuan lokasi penangkapan ikan juga menjadikan sebuah dilema. Oleh karena ikan biasanya berkumpul atau berkonsentrasi di lokasi atau perairan tertentu, dan dilema muncul ketika harus menentukan dan cara menentukan siapa yang memiliki akses ke

lokasi sumberdaya tersebut. Tentu saja, nelayan yang tidak memiliki akses ke lokasi yang lebih produktif ini menanggung biaya yang ditimbulkan pihak yang memegang akses. Keadaan yang disebutkan di atas tidaklah terlalu terasa di daerah penelitian, kontrol sosial yang ada telah mereduksi dan mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik. Eksternalitas tersebut memang tetap terjadi di dalam masyarakat, baik masalah eksternalitas teknologi maupun lokasi penangkapan.

Tabel 1. Produksi Jenis Ikan dan Nilai Produksi Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Tahun 2002.

No	Jenis Produksi	Produksi (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Udang Jerbung	17.396,53	61.333	1.066.988.460,00
2	Dogol	4.665,96	25.460	118.797.070,00
3	Udang Lobster	7.741,40	85.001	658.027.040,00
4	Jambu	22.984,70	1.479	34.005.620,00
5	Korosok	11.534,46	7.333	84.582.110,00
6	Bawal Putih	9.660,70	29.313	283.179.648,00
7	Bawal Hitam	5.181,20	32.287	167.286.830,00
8	Kacangan	23.529,40	6.166	145.071.615,00
9	Tenggiri	25.860,40	14.293	369.616.880,00
10	Tongkol	12.337,30	6.915	85.317.390,00
11	Kerapu	2.478,35	13.508	33.477.880,00
12	Manyung	5.745,80	6.839	39.295.820,00
13	Jangilus	4.270,20	9.233	39.427.780,00
14	Layur	118.055,75	4.170	492.306.130,00
15	Pari	12.663,73	4.989	63.180.320,00
16	Kakapasan	5.436,80	6.715	36.506.900,00
17	Abang-abang	3.270,20	32.186	105.255.675,00
18	Tiga Waja	67.367,80	3.174	213.809.280,00
19	Cucut	4.757,45	4.896	23.292.810,00
20	Grit	10.813,80	4.115	44.497.950,00
21	Kembung	40.735,51	4.777	194.592.630,00
22	Rajungan	1.701,85	11.362	19.337.170,00
23	Terongtong	503,90	11.685	5.888.160,00
24	Lain-lain	46.457,15	1.791	83.194.856,00
Jumlah		449.096,53		4.374.102.800,00

Sumber : Laporan KUD Mina Pari, Parigi 2002

Masyarakat nelayan di daerah ini mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan semakin sulitnya sumberdaya ikan diperoleh, diantaranya adalah karena semakin banyaknya nelayan yang beroperasi serta ada yang berpendapat bahwa penggunaan motor tempel menyebabkan kebisingan yang mengakibatkan "lari"nya ikan. Bagi masyarakat nelayan di daerah ini kondisi sumberdaya tidak lagi semudah dahulu, ketika itu nelayan hanya cukup untuk menebar jaring atau membawa perahu mereka tidak jauh dari pantai, nelayan telah mendapatkan hasil yang lebih dari cukup.

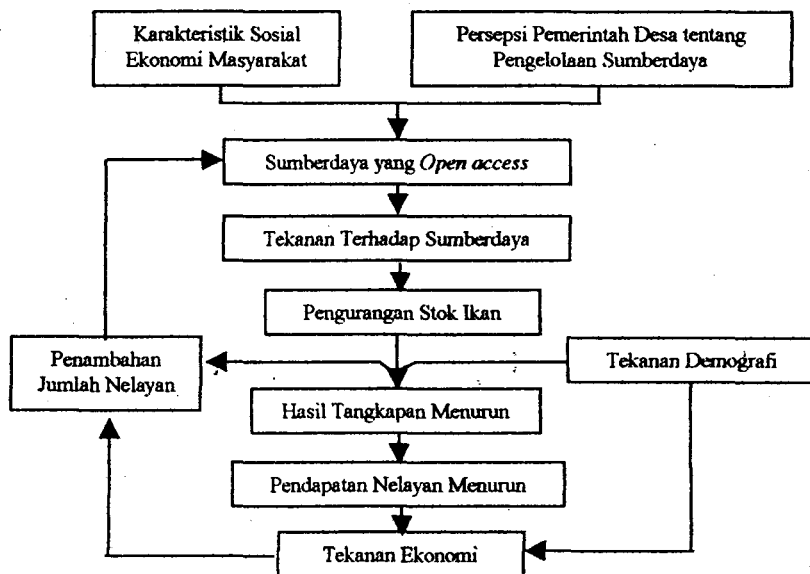
Sebuah implikasi yang wajar dari pandangan masyarakat atas konsepsi *open acces* dan *common property* terhadap sumberdaya yang dikelola dan dihadapi. Sistem pengelolaan yang sentralistis juga memberikan dampak terhadap doktrin sumberdaya yang *open access*. Sebelum munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah daerah tidak mendapatkan peran apapun di dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang dimilikinya, dan kini daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi daerahnya. Namun otonomi daerah hanya dipahami oleh aparat pemerintahan daerah tingkat kabupaten saja dan tidak menyentuh lapisan aparatur daerah di bawahnya yaitu

tingkat kecamatan dan desa. Setidaknya hal ini terungkap dari hasil wawancara terhadap aparat pemerintahan kecamatan dan desa di tempat penelitian ini dilaksanakan.

Open access memberikan gambaran bahwa tidak adanya yang bertanggung jawab (*users*) dalam pemeliharaan kelestarian sumberdaya karena masyarakat bebas untuk menangkap dimana saja. Ketika suatu daerah sumberdaya telah rusak, maka dengan mudah masyarakat mencari tempat lain untuk menangkap ikan. Berbeda halnya dengan sifat kepemilikan yang *private* (kepemilikan pribadi) atau *communal* (kepemilikan bersama oleh masyarakat), masyarakat akan berusaha untuk terus menjaga kelestarian sumberdayanya dan berusaha terus untuk memberikan nilai tambah atas sumberdaya yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut keberlangsungan usaha dan hidupnya.

Selain itu, prinsip pengelolaan *open access* biasanya menempatkan masing-masing *users* sebagai pesaing, hal ini disebabkan oleh pemikiran, jika masyarakat tidak mengambalnya terlebih dahulu, maka orang lain yang akan mengambalnya. Hal ini tidak terlalu terasa di daerah Desa Karangjaladri, masyarakat masih menyimpan dan memiliki perasaan komunal yang cukup tinggi. Sebuah ciri khas masyarakat komunal seperti yang dijelaskan oleh Durkheim diacu dalam Satria (2002) bahwa masyarakat komunal dicirikan oleh suatu semangat solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik memiliki ciri-ciri seperti masih rendahnya pembagian kerja, kesadaran kolektif yang kuat dan memiliki sistem hukum yang represif.

Pengelolaan yang bersifat *open access* yang terjadi di Desa Karangjaladri sangat kental terasa. Baik masyarakat dan pemerintah daerah tidak memberikan batasan-batasan atas sumberdaya laut yang ada di daerahnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya prinsip-prinsip batasan klaim sumberdaya, input seperti nelayan, alat tangkap dan jenis perahu, serta output seperti jenis ikan yang boleh ditangkap dan besarnya total tangkapan. Masyarakat tidak menganggap bahwa sumberdaya laut tersebut tidak ada yang memiliki (*res nullius*), karena apa yang masyarakat terima sebagai warisan pemikiran dari nenek moyangnya adalah bahwa laut merupakan milik bersama.



Gambar 1. Dampak Pengelolaan Sumberdaya *Common Property* yang *Open Access* terhadap Masyarakat

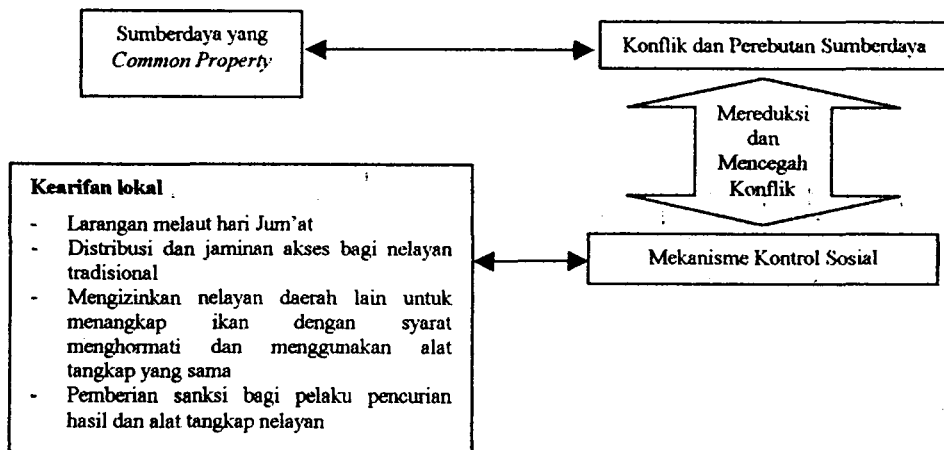
Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan suatu bentuk pola adaptasi dari masyarakat ketika dihadapkan pada permasalahan akan keterbatasan akses terhadap sumberdaya. Masyarakat akan menciptakan jaringan pengaman sosial yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka, seperti halnya kebutuhan akan modal ketika saluran-saluran formal yang ada tidak mampu untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Abdullah (2001) diacu dalam Benda-Beckman (2001) menyebutkan bahwa dalam kondisi saat kebijakan dan keadaan selalu berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian, maka keberadaan mekanisme jaminan sosial pada tingkat lokal merupakan suatu keharusan.

Jaminan sosial yang muncul ketika masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang tidak memberikan kepastian, maka hubungan patron-klien juga merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Pola hubungan yang terjadi antara juragan dengan pandega bersifat tidak mengikat namun saling membutuhkan dan juga bersifat simetris. Jaminan sosial lainnya yang terjadi di Desa Karangjaladri adalah seperti kegiatan arisan, simpan pinjam desa, simpanan di KUD, ikut serta di dalam keanggotaan kelompok nelayan pada RN (Rukun Nelayan) dan kegiatan keagamaan.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal yang dikatakan dapat mendukung usaha-usaha pengelolaan sumberdaya laut di daerah Desa Karangjaladri, antara lain adalah : *pertama*, adanya larangan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan pada setiap hari Jum'at. *Kedua*, perasaan sebagai bagian dari suatu komunitas untuk tujuan pemerataan sumberdaya. Nelayan yang memiliki tingkat teknologi yang lebih tinggi biasanya akan menghindari daerah penangkapan yang sama dengan nelayan tradisional (dayung). *Ketiga*, masyarakat nelayan mengizinkan bagi nelayan dari daerah luar untuk menangkap ikan di daerah mereka dengan syarat mereka menghormati seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Desa Karangjaladri dan menggunakan alat tangkap yang tidak merugikan nelayan-nelayan dari daerah setempat. *Keempat*, adanya kesepakatan bagi para pelaku hal-hal yang merugikan nelayan lain, seperti aktivitas pencurian ikan dan alat tangkap serta perusakan alat tangkap.



Gambar 2. Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Penyusunan Model Pengelolaan Sumberdaya

Variabel-variabel sumberdaya manusia dan sosial budaya menjadi suatu pertimbangan di dalam penentuan pra kondisi untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya secara *co-management*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulungen (2000) diacu *dalam* Anggraeni (2002) menyatakan kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut : (1) ikatan sosial dan politik masyarakat yang tinggi; (2) ketergantungan masyarakat akan sumberdaya pesisir tinggi; (3) tingkat kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan yang tidak lestari rendah; (4) kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumberdaya tinggi. Selain itu berdasarkan hasil penelitiannya, Anggraeni (2002) menambahkan beberapa kriteria lainnya, yaitu keinginan masyarakat untuk diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal tinggi; serta kemampuan SDM untuk menjadi inisiator, pengayom, penggerak dan stabilisator sedang.

Ciri lainnya yang sangat melekat pada masyarakat Desa Karangjaladri adalah peran kelembagaan lokal yang cukup tinggi bagi kehidupan pengelolaan sumberdaya laut keseharian. Kelembagaan lokal ini mencakup yang formal maupun kesepakatan-kesepakatan informal yang ada di dalam masyarakat. Kelembagaan formal yang memegang peranan penting adalah rukun nelayan (RN) yang sangat berpengaruh bagi masyarakat nelayan Desa Karangjaladri. Pengaruh RN ini bahkan mengalahkan pengaruh KUD Minapari yang cenderung hanya menjadi institusi jaminan ekonomi saja. RN sangat berperan di dalam mengatur praktek-praktek atas kesepakatan-kesepakatan yang terjadi diantara nelayan-nelayan.

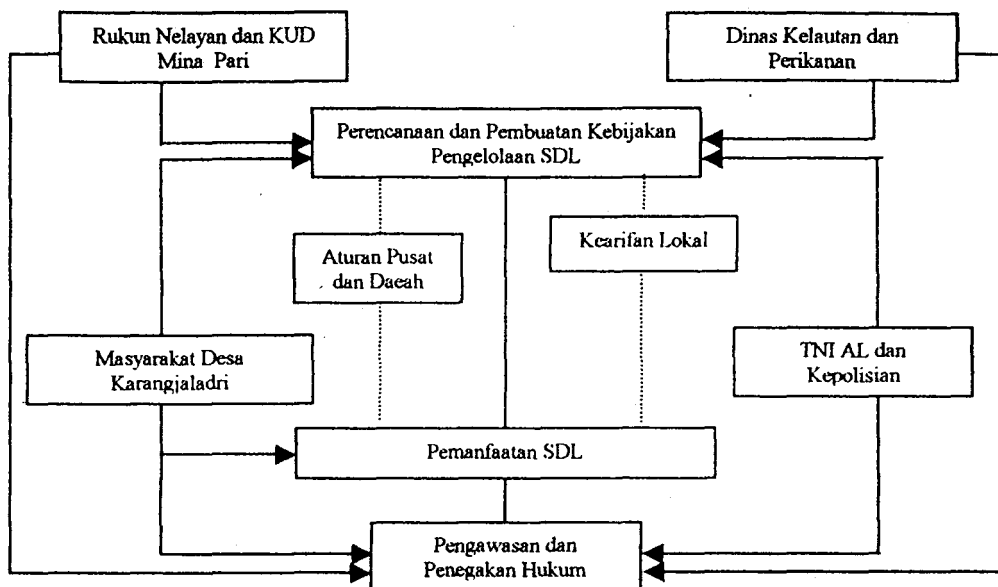
Tabel 2. Kriteria-kriteria yang Dimiliki oleh Masyarakat Desa Karangjaladri untuk Penerapan *Co management*, Tahun 2003

No	Variabel	Kriteria dari peneliti terdahulu	Kriteria di Desa Karangjaladri
1.	Ikatan sosial masyarakat*	Tinggi	Tinggi
2.	Ikatan politik masyarakat*	Tinggi	Sedang
3.	Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir*	Tinggi	Tinggi
4.	Tingkat kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan yang tidak lestari*	Rendah/sedang	Sedang
5.	Kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumberdaya*	Tinggi/lemah	Sedang
6.	Keinginan masyarakat untuk diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal**	Tinggi	Sedang
7.	Kemampuan SDM lokal saat ini, yang diharapkan dapat menjadi inisiator, pengayom, penggerak dan stabilisator**	Sedang	Sedang
8.	Peranan kelembagaan lokal***		Tinggi

Sumber : * Tulungen (2000) diacu *dalam* Anggraeni (2002)

** Anggraeni (2002)

*** Studi lapang



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan *Co-Management* di Desa Karangjladri

Kesimpulan dan Saran

Kearifan lokal yang dikatakan dapat mendukung usaha-usaha pengelolaan sumberdaya laut di daerah Desa Karangjladri, antara lain adalah : *pertama*, adanya larangan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan pada setiap hari Jum'at. *Kedua*, perasaan sebagai bagian dari suatu komunitas untuk tujuan pemerataan sumberdaya. Nelayan yang memiliki tingkat teknologi yang lebih tinggi biasanya akan menghindari daerah penangkapan yang sama dengan nelayan tradisional (dayung). *Ketiga*, masyarakat nelayan mengizinkan bagi nelayan dari daerah luar untuk menangkap ikan di daerah mereka dengan syarat mereka menghormati seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Desa Karangjladri dan menggunakan alat tangkap yang tidak merugikan nelayan-nelayan dari daerah setempat. *Keempat*, adanya kesepakatan bagi para pelaku hal-hal yang merugikan nelayan lain, seperti aktivitas pencurian ikan dan alat tangkap serta perusakan alat tangkap.

Jika dilihat dari kesemua variabel kondisi-kondisi yang tersedia di Desa Karangjladri, maka pendekatan model pengelolaan sumberdaya yang menggunakan konsep *co-management* menjadi sebuah alternatif yang diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang selama ini muncul akibat pengelolaan yang *common property* dan mengarah kepada *open access*. Dengan melihat kondisi-kondisi di atas maka bentuk dari model *co-management* yang tepat dilakukan pada masyarakat Desa Karangjladri adalah variasi dari gabungan tipe *konsultatif* dan *advisory* dengan tingkatan posisi masyarakat dan pemerintah yang kurang lebih seajar.

Daftar Pustaka

- Babbie E. 1991. *The Practice of Social Research: Third Edition*. Wadsworth Publishing Company. Belmont, California.
 Benda-Beckman F V, Benda-Beckman K V, Koning J. 2001. *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Bromley D W. 1991. *Environment and Economy: Property Rights and Public Policy*. Basil Blackwell.Inc. Cambridge, MA.
- Kusnadi. 2002. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Humaniora Utama Press. Bandung
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. LkiS. Yogyakarta
- Nikijuluw V P H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R)*.
- Poerwanto H. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ridley M and Low B S.1993. *Can Selfishness Save The Environment ?*. The Atlantic Monthly.
- Satria A, Umbari A, Fauzi A, Purbayanto A, Sutarto E, Muchsin I, Muflikhati I, Karim M, Saad S, Oktariza W, Imran Z. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Cidesindo. Jakarta

